

Judul : Pembahasan RUU BPIP kelar: PKS beri catatan, PAN ubah judul
Tanggal : Rabu, 03 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pembahasan RUU BPIP Kelar PKS Beri Catatan, PAN Ubah Judul



Reni Astuti

BADAN Legislasi (Baleg) DPR sepakat pembahasan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dibawa ke tahap selanjutnya. Dalam proses itu, dua fraksi, PKS dan PAN menyampaikan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

Reni Astuti yang mewakili Fraksi PKS menegaskan, fraksinya berkomitmen mendukung penguatan ideologi Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. PKS mengapresiasi diterimanya usulan agar Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dicantumkan sebagai salah satu dasar hukum dalam RUU BPIP.

Terkait struktur kelembagaan, PKS mendorong agar BPIP ditetapkan sebagai lembaga negara independen, tidak berada di bawah eksekutif. Namun, pembagian kewenangannya jelas agar tidak tumpang tindih dengan lembaga lain.

Selanjutnya, PKS menolak pembentukan perwakilan BPIP di daerah. BPIP tidak menjalankan fungsi operasional sehingga perluasan struktur justru berpotensi membebani anggaran dan bertentangan dengan semangat efisiensi.

"Pembentukan perwakilan daerah tidak diperlukan," ucapnya.

Selain itu, dia meminta agar mekanisme pengisian jabatan Dewan Pengarah dan Pelaksana diatur langsung dalam UU, bukan melalui Peraturan Presiden. Diperlukan juga koordinasi lintas lembaga dalam pembinaan ideologi Pancasila, mulai dari MPR, Lemhanas, kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, ormas, hingga komunitas lokal.

"Tata kelola yang jelas akan mencegah tumpang tindih kebijakan maupun munculnya tafsir tunggal atas Pancasila," katanya.

Di bagian penutup, Reni kembali menegaskan sikap fraksi. Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, kami menyatakan menyetujui dengan catatan RUU BPIP untuk dibahas pada tahapan selanjutnya," tutupnya.

Dari Fraksi PAN, pandangan fraksi yang disampaikan Andi Yuliani Paris memuat empat pokok catatan. Pertama, penguatan ideologi Pancasila tidak harus dimulai dari pembentukan lembaga baru, tapi bisa dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga yang telah ada. "Seperti MPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, serta institusi pendidikan," tegas Andi.

Kedua, penguatan ideologi harus tetap mencerminkan prinsip demokrasi, supremasi konstitusi, penghormatan HAM, serta keberagaman pemikiran. Menurutnya, pembinaan ideologi Pancasila perlu dijalankan dengan pendekatan edukatif, moderatif, dialogis, dan memberdayakan masyarakat. ■ PVB